

Amien Rais mengatakan dalam suatu kesempatan bahwa DPR cenderung kembali menjadi stempel pemerintah (Kompas, 20/2/08). Kerisauan Amien Rais agaknya bermula dari kurangnya kritisnya DPR dalam menyikapi kebijakan pemerintah dalam beberapa isu strategis semacam kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, yang dampaknya masih dirasakan sampai hari ini. Di satu sisi, penulis mengamini pernyataan Amien Rais meski di sisi lain penulis juga mempertanyakan mengapa Partai Amanat Nasional, yang sedikit banyaknya berada di bawah bayang-bayang Amien Rais, ikut-ikutan menjadi stempel dari berbagai kebijakan pemerintah. Dan seperti apakah relasi ideal PresidenParlemen yang ideal dalam politik ketatanegaraan kita?. Satu pertanyaan terasa kian penting untuk dijawab, ditengah upaya reformasi ketatanegaraan secara komprehensif.

Pengalaman kita sebagai bangsa telah lengkap menghadirkan potret relasi presiden dengan parlemen. Di masa Presiden Soeharto, hubungan presiden-DPR amatlah kolutif. Presiden seakan atasan langsung DPR. Apa pun kebijakan Soeharto akan disambut paduan suara yes man di DPR dan MPR. Akibatnya, soeharto bertahan hingga lebih dari 31 tahun. Pada esktrem lain, di masa Presiden Abdurrahman Wahid, relasi presidenparlemen amatlah konfrontatif. Presiden Wahid gagal membangun hubungan yang solid di DPR. Sebaliknya, ia terus berkonflik dengan parlemen. Akibatnya, masa kepresidenan Wahid hanya satu setengah tahun. Baik hubungan yang kolutif maupun konfrontatif sama-sama bukan relasi ideal antara prseiden-parlemen. Keduanya seharusnya membangun hubungan yang saling control dan saling imbang (cheeks and balances), yaitu hubungan yang konstruktif untuk bersama-sama mendorong agenda pembangunan bangsa dengan tetap membuka pintu bagi perbedaan pendapat dan ruang untuk saling mengingatkan. Relasi yang konstruktif itulah yang sedikit banyak terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY). Sebagai Presiden minoritas (minority presiden), SBY yang hanya didukung tujuh persen suara di DPR cukup berhasil mengelola irama konfliknya dengan DPR.